

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 14 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kabupaten Bandung	
	APBD P Ditolak, Pemkab Konsultasi ke Kemendagri	Galamedia/ Hal. 5
B	Kota Cimahi	
	Anggaran Penangan Pandemi Corona Baru Terserap 36 Persen	Galamedia/ Hal. 8

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : APBD P Ditolak, Pemkab Konsultasi ke Kemendagri

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/ Hal. 5

Edisi : Senin, 14 September 2020

Asep Warlan: Anggaran Macet Merugikan Masyarakat

APBD P Ditolak,

Pemkab Konsultasi ke Kemendagri

SOREANG,

Terkait penolakan pembahasan lebih lanjut dari sebagian besar fraksi DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun 2020, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung H. A. Tisna Umaman mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

"Tentunya kami menghormati pendapat dan sikap yang diambil DPRD. Selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan nanti ada rekomendasi langkah-langkah apa yang harus kami ambil sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Sekda Tisna Umaman di Soreang.

Dalam rilis yang diterima "GM",

Ahad (13/9), Tisna menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirimkan tim dan juga mengajukan surat terkait hal itu kepada Pemprov Jabar dan Kemendagri.

Pihaknya cukup menyayangkan adanya penolakan tersebut, karena dengan demikian banyak agenda program atau kegiatan pemerintah daerah (pemda) yang akan terhambat.

"Nanti dari pemprov dan Kemendagri akan ada jawaban atas surat yang kita ajukan terkait petunjuk, saran, dan rekomendasi. Dari sisi substansi anggaran perubahan itu sendiri ada agenda wajib yang harus dilaksanakan, termasuk penanganan covid-19 di dalamnya. Kalau tidak ada perubahan atau pergeseran anggaran, tentu kami akan kesulitan," tutur Tisna.

Keterlambatan pengesahan APBD

Perubahan itu, ~~lainnya~~, juga akan berdampak pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

"Jadi sebagai tindak lanjutnya, kami akan berkonsultasi. Karena pemerintahan itu bukan hanya eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten saja, ada level di atasnya yaitu pemprov dan pusat. Nanti kita ikuti aturannya seperti apa," ujarnya.

Picu Silpa besar

Sementara pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, idealnya APBD Perubahan 2020 disahkan antara bulan Agustus dan September.

"Pada Januari 2021 APBD murni harus ditetapkan, lalu dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa. Ke-

mudian di akhir triwulan pertama, proyek pembangunan sudah bisa dijalankan. Kalau terjadi kemacetan anggaran, pembangunan akan terhambat dan kemungkinan terjadi Silpa besar di ujungnya (akhir tahun)," tandas Asep Warlan.

Kemacetan anggaran, tambahnya, secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan masyarakat. Karena walau bagaimanapun, masyarakat membutuhkan dukungan anggaran.

"Apalagi beberapa regulasi pusat mengharuskan adanya refocusing, atau memprioritaskan anggaran untuk penanganan covid-19. Kalau APBD perubahan macet, maka penanganan covid dan pembangunan sektor lainnya akan terhambat," pungkas Asep.

(B.105)**

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Anggaran Penangan Pandemi Corona Baru Terserap 36 Persen
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 8
Edisi	: Senin, 14 September 2020

Anggaran Penanganan Pandemi Corona Baru Terserap 36 Persen

CIMAHI, (GM).-

Anggaran penanganan virus *corona* jenis baru atau Covid-19 di Kota Cimahi, baru terserap sekitar 36 persen atau Rp 69 miliar per Agustus kemarin. Total anggaran penanganan virus *corona* sendiri di Kota Cimahi, mencapai sekitar Rp 195 miliar.

Anggaran tersebut merupakan hasil *refocusing* dan realokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2020, yang dihimpun ke dalam Bantuan Tak Terduga (BTT). "Dari total Rp 195 miliar, ternyata baru diserap Rp 69 miliar atau sekitar 36 persen," terang Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, Ahad (13/9).

Wali kota menjelaskan, hingga saat ini anggaran penanganan wabah Covid-19 masih menyisakan sekitar Rp 126 miliar. Ajay menyatakan, masih banyaknya sisa anggaran tersebut bukan berarti pihaknya membatasi belanja kebutuhan penanganan virus *corona* di Kota Cimahi.

"Namun penggunaan anggaran tersebut akan dilakukan secara efisien dan tepat guna, untuk kepentingan penanganan pandemi virus *corona*. Pokoknya kita terus mengoptimalkan untuk bagaimana tepat sasaran dan tepat guna, bukan berarti dihamburkan. Penanganan terus jalan," papar Ajay.

Dikatakan Ajay, BTT tersebut tak akan tersentuh saat APBD Perubahan yang saat ini tengah dibahas. Sebab anggarannya masih dibutuhkan untuk penanganan Covid-19, apalagi tren kasus tersebut khususnya di Kota Cimahi cenderung terus mengalami penambahan.

Ajay melanjutkan, kondisi tersebut otomatis biaya belanja untuk kebutuhan penanganan akan terus dilakukan. Dirinya mencontohkan, keperluan barang habis pakai untuk kelengkapan *swab test*.

Arahan pusat

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana menambahkan, *refocusing* dan realokasi anggaran mendapat arahan langsung dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut dipangkas dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Jadi yang *refocusing* dari SKPD seperti dari belanja modal, serta belanja barang dan jasa difokuskan ke BTT," jelas Achmad.

Achmad menuturkan, anggaran BTT yang sudah terserap digunakan untuk berbagai penanganan Covid-19. Di antaranya belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan untuk masyarakat terdampak, serta pengadaan di bidang kesehatan.

Untuk anggaran BTT tersisa, kata Achmad, akan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berdasarkan perkembangan kasus virus *corona*. Namun jika tidak terserap tahun ini, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). "Tergantung keputusan pusat saja, dan lihat perkembangan. Mudah-mudahan kasusnya menurun, status daruratnya dicabut," imbuhnya. (B.110)**